



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Veteran No. 153 e-mail : kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com

PURWAKARTA 41115

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 800/Kep. 6 -Kesbangpol/2024

TENTANG

**PENETAPAN IDENTIFIKASI RISIKO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu ditindaklanjuti adanya Pengelolaan Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Identifikasi Risiko pada kewenangan entitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
 16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

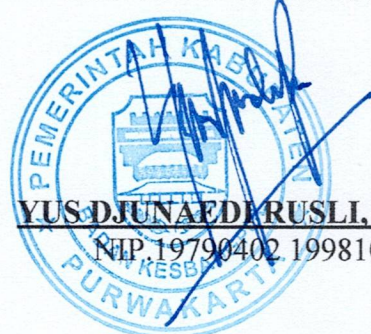
PERTAMA : Menetapkan Identifikasi Risiko yang menjadi kewenangan entitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Identifikasi risiko yang ada di badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta menjadi rujukan setiap unit kerja bidang dan sekretariat yang ada di wilayah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 3 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA



YUS DJUNAEDIRUSLI, S.STP.,M.Si
NIP.19790402.199810 1 001

Tembusan: disampaikan kepada;

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Purwakarta

Nomor : 800/Kep. 6 -Kesbangpol/2024

Tentang : Penetapan Identifikasi Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS BADAN KESBANGPOL PURWAKARTA

Nama OPD	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode yang dinilai	:	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026	
Urusan Pemerintahan Daerah	:	Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sumber Data	:	Rencana Strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026	
Tujuan Strategis	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	
	:	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
	:	Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	
IKU Strategis	:	IKU	Target
		1. Capaian Sakip Perangkat Daerah	A
		2. Persentasi Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%
		3. Tingkat Pemenuhan Dukungan Kesatuan Bangsa	100%
		4. Tingkat Pemenuhan Dukungan Politik Dalam Negeri	100%
		5. Tingkat Pemenuhan Dukungan Kewaspadaan Dini di Daerah	100%
Program	:	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLIITK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	
		4 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	
		5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
		6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	:	Tujuan Strategis	
	>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	
	>	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	
	:	Sasaran Strategis	

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	>	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
	>	Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	
	:	IKU Strategis	
		1. Tingkat Pemenuhan Dukungan Kesatuan Bangsa	100%
		2. Tingkat Pemenuhan Dukungan Politik Dalam Negeri	100%
		3. Tingkat Pemenuhan Dukungan Kewaspadaan Dini di Daerah	100%
	:	Program	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

Purwakarta, 3 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Purwakarta



YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP, M.Si
 NIP. 19790402 199810 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama OPD	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode yang dinilai	:	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026	
Urusan Pemerintahan Daerah	:	Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sumber Data	:	Rencana Strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026	
Tujuan Strategis	:	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	Target
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%
	:	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	100%
	:	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	100%
	:	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	100%
	:	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%
	:	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%
Keluaran/Hasil Kegiatan	:	1. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	
		2. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	
		3. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	
		4. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan dibidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
		5. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
		6. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian resiko	:	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	A	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Keluaran/Hasil : 100%	

Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian resiko	:	Program : PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
	A	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	
		Keluaran/Hasil : 100%	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian resiko	:	Program : PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	
	A	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	
		Keluaran/Hasil : 100%	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian resiko	:	Program : PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	
	A	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan dibidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
		Keluaran/Hasil : 100%	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian resiko	:	Program : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
	A	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
		Keluaran/Hasil : 100%	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian resiko	:	Program : PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	A	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	
		Keluaran/Hasil : 100%	

Purwakarta, 3 Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta



IDENTIFIKASI RISIKO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Nama OPD : Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten
Tahun Penilaian : 2024
Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2024-2026)
Urusan Pemerintahan :

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1. RISIKO STRATEGIS OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel									
	Sasaran.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Masyarakat								
			Tidak tersusun dan terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah	RSO.24.33.05.01	Kasubdag Tata Usaha	Kurangnya SDM dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan	Internal	C	Turunnya Nilai SAKIP	kesbangpol
	Tujuan 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai									
	Sasaran.2 : Meningkatkan Ketertarikan dan Kerukunan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama								
			Perselisihan antar umat bergama terkait pembangunan tempat beribadah	RSO.24.35.05.02	Badan kesatuan bangsa dan politik	Kurangnya pemahaman pengurus FKUB danPemuka Agama Lainnya Atas Peraturan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama	Internal	C	Kerukunan hidup beragama tidak kondusif	Masyarakat
			Keterlambatan proses pencairan hibah untuk partai politik dan pilkada 2024	RSO.24.40.05.03	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Syarat tidak lengkap	Internal		Kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	KPU dan Bawaahl, Masyarakat, Pemerintah

		Menemuknya potensi konflik yang dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.24.35.05.04	Kepala Seksi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Kurangnya sosialisasi mengenai penanganan konflik sosial serta kesadaran individu dan kelompok dalam berbangsa dan bernegara	Internal/Eksternal	C	Menurunnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara	Masyarakat
2. RISIKO OPERASIONAL OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kekurangan pemahaman tentang wawasan kebangsaan	ROO.24.33.28.01	Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kurangnya Pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan dalam implementasi berorganisasi dan bermasyarakat	Internal	C	Melemahnya Kerukunan Umat Beragama dan menurunnya toleransi antar umat	Kesbang,Masyarakat
1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kekurangan pemahaman tentang wawasan kebangsaan	ROO.24.33.28.02	Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kurangnya Pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan dalam implementasi berorganisasi dan bermasyarakat	Internal	C	Melemahnya Kerukunan Umat Beragama dan menurunnya toleransi antar umat	Kesbang, Masyarakat
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah	Terjadinya konflik antar umat beragama dan suku	ROO.24.33.28.03	Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kurangnya pemahaman pengurus FKUB dan pnuke agama lainnya atas peraturan fasilitasi kerukunan umat beragama	Internal	C	Perpecahan kerukunan dimasyarakat	Kesbangpol, FKUB Kabupaten

	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah	Kurangnya Toleransi dalam melaksanakan ibadah hari besar keagamaan bagi umat beragama	ROO.24.33.28.04	Kepala Seksi Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Tidak adanya koordinasi dengan pihak yang berkompeten untuk melaksanakan pengamanan hari besar keagamaan	Internal	C	Pelaksanaan penindakan menjadi tidak kondusif	kesbangpol, masyarakat
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah	informasi situasi kurang memadai	ROO.24.33.28.05	Kepala Seksi Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kurangnya koordinasi dengan instansi Terkait	Internal	C	terjadinya konflik sosial terkait kepercayaan masyarakat	Kesbangpol, dan Masyarakat
	1. Program penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	kurang tersampainya acara kegiatan kepada sasaran peserta	ROO.24.33.28.06	Kepala Seksi Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kurangnya Koordinasi Intens antara kesbangpol dan sasaran kegiatan	Internal	C	peserta tidak sesuai dengan target	Kesbangpol, Organisasi kemasyarakatan
	1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan Penyalagunaan Narkoba Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	kurang tersampainya acara kegiatan kepada sasaran peserta	ROO.24.33.28.07	Kepala Seksi Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kurangnya Koordinasi Intens antara kesbangpol dan sasaran kegiatan	Internal	C	peserta tidak sesuai dengan target	Kesbangpol, Organisasi kemasyarakatan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kurang tersampainya acara kegiatan kepada sasaran peserta	ROO.24.33.28.08	Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kurangnya Koordinasi Intens antara kesbangpol dan sasaran kegiatan	Internal	C	peserta tidak sesuai dengan target	Kesbangpol, dan Masyarakat
1. Program : Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik	Kurangnya pemahaman Masyarakat dalam kegiatan Berpolitik	ROO.24.40.28.09	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Kurangnya Sumber Daya Manusia pengurus parpol	Internal	C	kurangnya Minat Masyarakat Menjadi Pengurus Parpol	Kesbangpol, partai politik, kemasyarakatan
1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan penantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelengkapan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta penamtanuan situasi politik	Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) Jumlah Peserta Yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik	Kurangnya pemahaman Masyarakat dalam kegiatan Berpolitik	ROO.24.40.28.09	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pendidikan dan pemahaman politik bagi masyarakat	Internal	C	kurangnya Minat Masyarakat Menjadi Pengurus Parpol	Kesbangpol, partai politik, kemasyarakatan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelengkapan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelengkapan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	ROO.24.40.28.10	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Peran parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat belum optimal	Eksternal	C	kurangnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintah/ pemimpin yang dihasilkan dari pemilu tersebut	pemerintah dan masyarakat

	Sub.Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai politik pemilihan umum/Pemilihan umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik didaerah	informasi Terkait Perkembangan Politik di Purwakarta Kurang Memadai	ROO.24.40.28.11	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Kurangnya SDM diinternal kesbangpol	internal/eksternal	C	tidak ada bahan evaluasi bagi pimpinan dan pengambil kebijakan	Kesbangpol, Pemangku Kebijakan
	1. Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang menyampatkan laporan kegiatan	Kurangnya KoordinasiOrmas dengan Kesbangpol	ROO.24.99.28.12	kepala seksi politik dalam negeri dan pengawasan ormas	Terdapat Konflik antar Ormas	Eksternal	C	Kurangnya Kontrol Terhadap Ormas yang tidak tercatat	Kesbangpol,ormas
	1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang Menyampaikan Pendaftaran, Evaluasi Laporan Kegiatan Jumlah Pengawasan Ormas LSM yang telah Dilaksanakan	Kurangnya KoordinasiOrmas dengan Kesbangpol	ROO.24.99.28.13	kepala seksi politik dalam negeri dan pengawasan ormas	Terdapat Konflik antar Ormas	Eksternal	C	Kurangnya Kontrol Terhadap Ormas yang tidak tercatat	Kesbangpol,ormas
	Sub.Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	ROO.24.99.28.14	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Banyaknya Ormas/Yayasan dan LSM yang belum melaporkan keberadaannya	Eksternal	C	Timbulnya kegiatan ormas,yayasan,LSM yang meresahkan masyarakat karena tidak ada pengawasan	Masyarakat dan Ormas
	1. Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Kekurangan SDM Internal (Kesbang Pol) dalam pelaksanaan Program PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	ROO.24.99.28.15	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kurangnya koordinasi dan pemantauan terhadap program PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL dengan lembaga Vertikal	Internal	C	Lemahnya kualitas dan kuantitas atas PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kesbangpol
			Perencanaan Anggaran tidak memadai dalam menunjang Program Tsb.			Kebijakan pimpinan dalam menentukan Anggaran prioritas				
			SOP / Peraturan Internal Belum Sesuai Standar							

1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Daerah Jumlah Pemantapan, Deteksi dini, Pengamanan di Daerah	Kekurangan SDM Internal Kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	ROO.24.99.28.16	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Formasi Jabatan belum sesuai	Internal/ Eksternal	C	Tidak terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kesbang Pol
		Perencanaan Anggaran tidak memadai dalam menunjang Keg.Teb.			Kebijakan pimpinan dalam menentukan Anggaran prioritas	Internal			
Sub.Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kualitas sinkronisasi, keamanan, ketertarikan dan ketertiban antara muspida dan masyarakat	ROO.24.99.28.17	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Monitoring dan koordinasi dengan Kominda terkait pengawasan dan pemantauan keamanan, ketertarikan dan ketertiban antara muspida dan masyarakat mengenai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan di Wilayah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Permendagri no 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah	Internal	C	Monitoring dan koordinasi dengan Kominda terkait pengawasan dan pemantauan keamanan, ketertarikan dan ketertiban antara muspida dan masyarakat mengenai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan di Wilayah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Permendagri no 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Sub.Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Tim Kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	ROO.24.99.28.18	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Monitoring dan koordinasi dengan OPD terkait pengawasan Orang Asing dan Imigrasi terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing dan Orang Asing di Wilayah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Permendagri No 49 dan 50 Tahun 2010 tentang pengawasan tenaga kerja asing dan orang asing di daerah	Internal	C	Monitoring dan koordinasi dengan OPD terkait pengawasan Orang Asing dan Imigrasi terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing dan Orang Asing di Wilayah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Permendagri No 49 dan 50 Tahun 2010 tentang pengawasan tenaga kerja asing dan orang asing di daerah	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kualitas sinkronisasi, keamanan, ketentrman dan keterliban antara muspida dan masyarakat	ROO.24.99.28.19	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Berkoordinasi terkait keamanan, ketentrman dan keterliban antara muspida dan masyarakat mengenai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 26	C	Berkoordinasi terkait keamanan, ketentrman dan keterliban antara muspida dan masyarakat mengenai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 26	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
	1. Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bakesbangpol mengalami penurunan	ROO.24.99.28.20	Kasubbag Tata Usaha	Dokumen pemenuhan dalam penilaian SAKIP Bakesbangpolidak lengkap	Internal	C	Kredibilitas kinerja Bakesbangpol menurun
	1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat kinerja yang di susun	Tidak tersusun dan terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah	ROO.24.99.28.21	Kasubbag Tata Usaha	Kurangnya SDM dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan	Internal	C	Turunnya Nilai AKIP
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketidakeesuaian antara renja yang telah disusun dengan Renstra OPD	ROO.24.99.28.22	Kasubbag Tata Usaha	Kurangnya Pengawasan dalam proses penyusunan	Internal	C	Turunnya Nilai AKIP
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tidak tercapainya capaian kinerja OPD	ROO.24.99.28.23	Kasubbag Tata Usaha	Kurang dalam memonitoring pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Turunnya Nilai AKIP
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN. Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Tidak terciptanya laporan keuangan dalam catatan pelaporan keuangan. Realisasi anggaran dan ekuitas pelaporan keuangan	ROO.24.99.28.24	Kasubbag Tata Usaha	Kurangnya pemahaman dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan realisasi anggaran dan ekuitas pelaporan	Internal	C	Kurangnya pelaksanaan pembinaan maupun sosialisasi dalam pelaporan keuangan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keterlambatan Pengajuan Pembayaran dan pegajian gaji berkala dan pangkat	ROO.24.99.28.25	Kasubbag Tata Usaha	Telatnya Pengajuan usulan Gaji dan Gaji Berkala ke bagian BKAD	Internal	C	terlambatnya dalam mengusulkan gaji dan gaji berkala

Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tidak terciptanya laporan keuangan dalam catatan pelaporan keuangan, Realisasi anggaran dan ekuitas pelaporan keuangan	ROO.24.99.28.26	Kasubbag Tata Usaha	Kurangnya pemahaman dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan realisasi anggaran dan ekuitas pelaporan	Internal	C	Kurangnya pelaksanaan pembinaan maupun sosialisasi dalam pelaporan keuangan	kesbangpol
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun	Tidak terdapatnya data aset barang milik daerah	ROO.24.99.28.27	Kasubbag Tata Usaha	Lainnya Petugas barang milik daerah dalam pencatatan buku barang milik daerah	Internal	C	barang tidak tercatat dalam pembukuan aset daerah	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tidak terdapatnya data aset barang milik daerah	ROO.24.99.28.28	Kasubbag Tata Usaha	Lainnya Petugas barang milik daerah dalam pencatatan buku barang milik daerah	Internal	C	barang tidak tercatat dalam pembukuan aset daerah	kesbangpol
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket Pakaiatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Dibutuhkan	kurangnya koordinasi peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis	ROO.24.99.28.29	Kasubbag Tata Usaha	Undangan tidak tersampaikan kepada peserta	Internal	C	Output kegiatan tidak tercapai	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Pengadaan Pakaiatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ketidaksesuaian antara harga barang/product dari penyedia di Platform e-purchasing (Katalog Elektronik) dengan Nilai HPS (IDPA) satker, dengan Speksifikasi yang sama	ROO.24.99.28.30	Kasubbag Tata Usaha	Tidak mengusulkan SSH Kota Semarang, dengan kondisi harga dan spesifikasi yang sama di Platform e-purchasing (Katalog Elektronik)	Internal	C	Keterlambatan Waktu dalam Proses Pengadaan Barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Elektronik), ketidaksesuaian Speksifikasi Balanja Pengadaan barang/jasa	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pekerjaan menjadi tidak sesuai dengan tupoksi	ROO.24.99.28.31	Kasubbag Tata Usaha	Kurangnya pegawai yang memahami tugas dan fungsinya	Internal	C	Pekerjaan menjadi tidak sesuai dengan tupoksi	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	pengelola data kepegawaian tidak efektif dan akurat	ROO.24.99.28.32	Kasubbag Tata Usaha	kurangnya pemahaman pegawai terhadap administrasi kepegawaian	Internal	C	pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian menjadi tidak tersusun secara sistematis	kesbangpol
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan	Keterlambatan kelengkapan administrasi Umum	ROO.24.99.28.33	Kasubbag Tata Usaha	Kurangnya pemahaman dalam penyusunan bukti spj	Internal	C	Output kegiatan tidak tercapai	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kebutuhan komponen alat2 listrik kantor tidak tersedia	ROO.24.99.28.34	Kasubbag Tata Usaha	Kerusakan komponen/ alat2 listrik tidak bisa	Internal	C	Output kegiatan tidak tercapai	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kebutuhan komponen peralatan dan perlengkapan kantor tidak tersedia	ROO.24.99.28.35	Kasubbag Tata Usaha	Adanya keterlambatan Surat Pesanan kepada penyedia	Internal	C	Tidak tersedianya Peralatan perlengkapan kantor	kesbangpol

Sub.Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.28.36	Kasubbag Tata Usaha	Adanya keterlambatan Surat Pesanan kepada penyedia	Internal	C	Keterlambatan Waktu dalam Proses Pengadaan Barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Lokal), ketidaksesuaian Spesifikasi Balanja Pengadaan barang/jasa	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keterlambatan penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas	ROO.24.99.28.37	Kasubbag Tata Usaha	Kurang koordinasi dengan pihak Jasa Travel	Internal	C	Keterlambatan dalam pembayaran	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.28.38	Kasubbag Tata Usaha	Terdapat keterlambatan Surat Pesanan Barang Cetakan	Internal	C	Keterlambatan Waktu dalam Proses Pengadaan Barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Lokal), ketidaksesuaian Spesifikasi Balanja Pengadaan barang/jasa	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kedatangan tamu tidak bisa diprediksi	ROO.24.99.28.39	Kasubbag Tata Usaha	Tidak ada koordinasi dari pihak luar	Internal	C	Tidak diberikan jamuan tamu	kesbangpol
Sub.Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ketidak sesuaian antara harga barang/product dari penyedia di Platform e-purchasing (Katalog Elektronik) dengan Nilai HPS (DPA) saiker, dengan Speksifikasi yang sama	ROO.24.99.28.40	Kasubbag Tata Usaha	Tidak mengusulkan SSH Kab Purwakarta, dengan kondisi harga dan spesifikasi yang sama di Platform e-purchasing (Katalog Elektronik)	Internal	C	Keterlambatan Waktu dalam Proses Pengadaan Barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Elektronik), ketidaksesuaian Spesifikasi Balanja	kesbangpol
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan	Penyedia kurang responsif/jama dalam menyangkan productnya melalui e-purchasing (Katalog Elektronik)	ROO.24.99.28.41	Kasubbag Tata Usaha	Ketidaksesuaian rencana waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di HPS dengan usulan waktu yang direpsons oleh penyedia saat pemesanan barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Elektronik)	Internal	C	Keterlambatan Waktu dalam Proses Pengadaan Barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Elektronik)	kesbangpol

	Sub. Kegiatan : Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Penyedia kurang responsif/ lama dalam menayangkan productnya melalui e-purchasing (Katalog Elektronik)	ROO.24.99.28.42	Kasubdag Tata Usaha	Ketidaksesuaian rencana waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di HPS dengan usulan waktu yang direpsons oleh penyedia saat pemesanan barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Elektronik)	Internal	C	Keterlambatan Waktu dalam Proses Pengadaan Barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Elektronik)	kesbangpol
	Sub. Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Penyedia kurang responsif/ lama dalam menayangkan productnya melalui e-purchasing (Katalog Elektronik)	ROO.24.99.28.43	Kasubdag Tata Usaha	rencana waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di HPS dengan usulan waktu yang direpsons oleh penyedia saat pemesanan barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Elektronik)	Internal	C	Keterlambatan Waktu dalam Proses Pengadaan Barang/jasa melalui e-purchasing (Katalog Elektronik)	kesbangpol
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan	Adanya keterlambatan untuk penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	ROO.24.99.28.42	Kasubdag Tata Usaha		Internal	C		kesbangpol
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya keterlambatan penyedia jasa surat/ koran	ROO.24.99.28.43	Kasubdag Tata Usaha	Kurang koordinasi dengan pihak surat/ koran	Internal	C	Keterlambatan dalam pembayaran	kesbangpol
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Adanya keterlambatan pemilihan penyedia pengelolaan medsos	ROO.24.99.28.44	Kasubdag Tata Usaha	Kurangnya Pengawasan dalam proses penyusunan	Internal	C	Pengelolaan medsos OPD tidak berjalan dengan lancar	kesbangpol

Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Adanya pegawai TPHL dan Driver yang Resign (ketuar)	ROO.24.99.28.45	Kasubbag Tata Usaha	diterima bekerja di perusahaan / CPNS/ PPPK	Internal	C	terganggunya administrasi perkantoran	kesbangpol
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.28.46	Kasubbag Tata Usaha	kurangnya pemeliharaan barang milik daerah	Internal	C	Operasional OPD	kesbangpol
Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.28.47	Kasubbag Tata Usaha	Kerusakan komponen/ alat2 komputer dll tidak bisa	Internal	C	Output kegiatan tidak tercapai	kesbangpol
Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.28.48	Kasubbag Tata Usaha	Kerusakan bangunan kantor	Internal	C	Operasional OPD	kesbangpol
Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	kendaraan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeliharaan	ROO.24.99.28.49	Kasubbag Tata Usaha	tidak diterbitkannya surat persetujuan uji kelayakan kendaraan dari Dishub	Internal	C	Operasional Kegiatan OPD	kesbangpol

Purwakarta, 3 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta



YUS DUNNEDI ROSLI, S.STP, M.Si
NIP. 197306042 199810 1 001

ANALIS HASIL RISIKO

Nama Pemerintah Daerah
Nama OPD
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintah

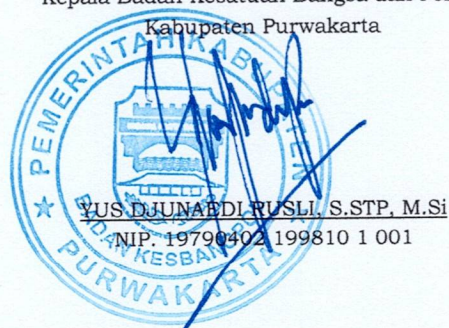
: Pemerintah Kabupaten Purwakarta
: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
: 2024
: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman,
: Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			
		Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
I	RISIKO STRATEGIS BANGSA DAN POLITIK				
1	Tidak tersusun dan terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah	RSO.24.99.05.11	3	2	6
2	Perselisihan antar umat bergama terkait pembangunan tempat beribadah	RSO.24.99.05.01	4	3	12
3	Keterlambatan proses pencairan hibah untuk partai politik dan pilkada tahun 2024	RSO.24.40.05.02	3	3	9
4	Menjemuknya potensi konflik yang dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.24.99.05.03	3	3	9
II	RISIKO OPERASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	kekurangan pemahaman tentang wawasan kebangsaan	ROO.24.28.05.01	3	1	3
2	Terjadinya Konflik antar umat beragama dan suku	ROO.24.28.05.01	3	3	9
3	Kurangnya Toleransi dalam melaksanakan Ibadah hari besar Keagamaan bagi umat beragama	ROO.24.28.05.02	3	3	9
4	informasi situasi kurang memadai	ROO.24.28.05.03	3	1	3
5	kurang tersampainya acara kegiatan kepada sasaran peserta	ROO.24.28.05.04	2	1	2
6	Kurangnya pemahaman Masyarakat dalam kegiatan Berpolitik	ROO.24.32.05.05	2	2	4
7	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	ROO.24.32.05.04	3	3	9
8	informasi Terkait Perkembangan Politik di Purwakarta Kurang Memadai	ROO.24.32.05.06	2	2	4
9	Kurangnya Koordinasi Ormas dengan Kesbangpol	ROO.24.32.05.07	2	2	4
10	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	ROO.24.32.05.07	2	2	4
11	Kekurangan SDM Internal Kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	ROO.24.32.05.08	3	3	9

12	Jumlah Kualitas sinkronisasi, keamanan, ketentraman dan ketertiban antara muspida dan masyarakat	ROO.24.32.05.08	2	2	4
13	Jumlah Tim Kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	ROO.24.32.05.09	3	1	3
14	Jumlah Kualitas sinkronisasi, keamanan, ketentraman dan ketertiban antara muspida dan masyarakat	ROO.24.32.05.10	2	2	4
	Tidak tersusun dan terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah	ROO.24.99.05.11	2	2	4
	Tidak tersusun dan terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah	ROO.24.99.05.12	2	1	2
	Ketidaksesuaian antara renja yang telah disusun dengan Renstra OPD	ROO.24.99.05.13	3	1	3
	Tidak tercapainya capaian kinerja OPD	ROO.24.99.05.14	3	1	3
	Tidak terciptanya laporan keuangan dalam catatan pelaporan keuangan, Realisasi anggaran dan ekuitas pelaporan keuangan	ROO.24.99.05.15	3	1	3
	Keterlambatan Pengajuan Pembayaran dan pegajuan gaji berkala dan pangkat	ROO.24.99.05.16	3	1	3
	Tidak terciptanya laporan keuangan dalam catatan pelaporan keuangan, Realisasi anggaran dan ekuitas pelaporan keuangan	ROO.24.99.05.17	2	2	4
	Tidak terdapatnya data aset barang milik daerah	ROO.24.99.05.18	3	1	3
	Tidak terdapatnya data aset barang milik daerah	ROO.24.99.05.19	3	1	3
	kurangnya koordinasi peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis	ROO.24.99.05.20	2	1	2
	Ketidaksesuaian antara harga barang/product dari penyedia di Platform e-purchasing	ROO.24.99.05.21	2	2	4
	Pekerjaan menjadi tidak sesuai dengan tupoksi	ROO.24.99.05.22	2	2	4
	pengelola data kepegawaian tidak efektif dan akurat	ROO.24.99.05.23	3	1	3
	Keterlambatan kelengkapan administrasi Umum	ROO.24.99.05.24	3	1	3
	kebutuhan komponen alat2 listrik kantor tidak tersedia	ROO.24.99.05.25	2	1	2
	Kebutuhan komponen peralatan dan perlengkapan kantor tidak tersedia	ROO.24.99.05.26	2	1	2
	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.05.27	2	1	2

	Keterlambatan kelengkapan administrasi perjalanan dinas	ROO.24.99.05.28	3	1	3
	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.05.29	2	1	2
	Kedatangan tamu tidak bisa diprediksi	ROO.24.99.05.30	2	1	2
	Ketidak sesuaian antara harga barang/product dari penyedia di Platform e-purchasing	ROO.24.99.05.31	3	1	3
	Penyedia kurang responsif/lama dalam menyangkan productnya melalui e-	ROO.24.99.05.32	2	2	4
	Penyedia kurang responsif/lama dalam menyangkan productnya melalui e-	ROO.24.99.05.33	2	2	4
	Penyedia kurang responsif/lama dalam menyangkan productnya melalui e-	ROO.24.99.05.34	2	2	4
	Adanya keterlambatan untuk penyediaan jasa penunjang urusan poemerintah daerah	ROO.24.99.05.35	3	1	3
	Adanya keterlambatan penyedia jasa surat/koran	ROO.24.99.05.36	2	1	2
	Adanya keterlambatan pemilihan penyedia pengelolaan medsos	ROO.24.99.05.37	2	1	2
	Adanya pegawai TPHL dan Driver yang Resign (keluar)	ROO.24.99.05.38	3	1	3
	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.05.39	2	1	2
	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.05.40	2	1	2
	Speksifikasi tidak tersedia	ROO.24.99.05.41	2	1	2
	kendaraan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeliharaan	ROO.24.99.05.42	3	1	3

Purwakarta, 7 Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta



DAFTAR RISIKO PRIORITAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nama Pemerintah Daerah
 Nama OPD
 Tahun Penilaian
 Tujuan Strategis
 Urusan Pemerintah

: Pemerintah Kabupaten Purwakarta
 : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
 : 2024
 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai
 : Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
I RISIKO STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1	Tidak tersusun dan terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah	RSO.24.33.05.01	6	Kasubbag Tata Usaha	Kurangnya SDM dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan	Turunnya Nilai SAKIP
2	Perselisihan antar umat bergama terkait pembangunan tempat beribadah	RSO.24.35.05.02	12	Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kurangnya pemahaman pengurus FKUB danPemuka Agama Lainnya Atas Peraturan Fasilitasi KerukunanUmat Beragama	Kerukunan hidup beragama tidak kondusif
3	Keterlambatan proses pencairan hibah untuk partai politik dan pilkada tahun 2024	RSO.24.40.05.03	9	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Syarat tidak lengkap	Kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan
4	Menjunmuknya potensi konflik yang dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.24.35.05.04	9	Kepala Seksi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Kurangnya sosialisasi mengenai penanganan konflik sosial serta kesadaran individu dan kelompok dalam berbangsa dan bernegara	Menurunnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara
II RISIKO OPERASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1	Terjadinya konflik antar umat beragama	ROO.24.33.28.03	9	Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kurang pemahaman pengurus FKUB dan pemuka agama lainnya atas peraturan fasilitasi kerukunan umat beragama	Perpecahan kerukunan dimasyarakat
2	Kurangnya Toleransi dalam melaksanakan ibadah hari besar Keagamaan bagi umat beragama	ROO.24.33.28.04	9	Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Tidak adanya koordinasi dengan pihak yang berkompeten untuk melaksanakan pengamanan hari besar keagamaan	Pelaksanaan penindakan menjadi tidak kondusif

3	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	ROO.24.40.28.10	9	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Peran parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat belum optimal	kurangnya legislasi masyarakat terhadap pemerintah/ pemimpin yang dihasilkan dari pemilu tersebut
4	Kekurangan SDM Internal Kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	ROO.24.99.28.16	9	Kepala Seksi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Formasi jabatan belum sesuai	Tidak terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

Purwakarta, Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta

YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP, M.Si
NIP. 19790402 199810 1 001

MATRIK HASIL ANALISIS

URUSAN : Urusan Pilihan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

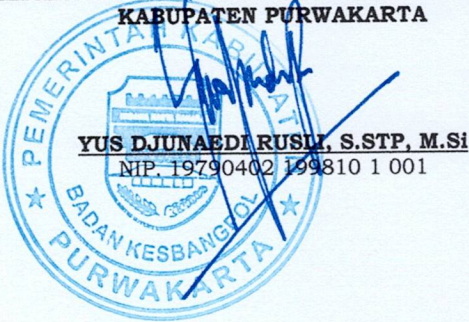
MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan terjadinya risiko	Hampir Pasti	4			RSO.24.99.05.04 ROO.24.28.28.01 ROO.24.28.28.02	RSO.24.99.05.02
	Kemungkinan Besar	3		ROO.24.32.28.05 ROO.24.32.28.06 ROO.24.32.28.07 ROO.24.32.28.07 ROO.24.32.28.08 ROO.24.99.28.18	RSO.24.99.05.1 RSO.24.40.05.03 ROO.24.32.28.04 ROO.24.28.28.01	
	Kemungkinan Kecil	2	ROO.24.28.28.04 ROO.24.99.28.12 ROO.24.99.28.13 ROO.24.99.28.14 ROO.24.99.28.15 ROO.24.99.28.16 ROO.24.99.28.17 ROO.24.99.28.20 ROO.24.99.28.41 ROO.24.99.28.40 ROO.24.99.28.19	ROO.24.28.28.01 ROO.24.28.28.03 ROO.24.32.28.09 ROO.24.32.28.10 ROO.24.99.28.11 ROO.24.99.28.21 ROO.24.99.28.26 ROO.24.99.28.28 ROO.24.99.28.29 ROO.24.99.28.31 ROO.24.99.28.35	ROO.24.99.28.22 ROO.24.99.28.23 ROO.24.99.28.24	
	Sangat Jarang	1	ROO.24.99.28.42 ROO.24.99.28.20 ROO.24.99.28.25 ROO.24.99.28.36 ROO.24.99.28.37	ROO.24.99.28.30 ROO.24.99.28.38 ROO.24.99.28.39	ROO.24.99.28.32 ROO.24.99.28.33 ROO.24.99.28.34	

Keterangan

Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
---------------	--------	--------	---------------

Purwakarta, 3 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA


YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP, M.Si
NIP. 19790402 199810 1 001

1	Terjadinya Konflik antar umat beragama dan suku	ROO.24.33.28.03	koordinasi dengan instansi vertikal khususnya jika langsung ditemui adanya konflik	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Kepala Daerah	Menyampaikan isu kaitan dengan diintegrasikan bangsa/suku yang akan memecah belah persatuan dan Kesatuan Bangsa		TW1-TW IV
2	Kurangnya Toleransi dalam melaksanakan ibadah hari besar Keagamaan bagi umat beragama	ROO.24.33.28.04	Telah dilaksanakan Sosialisasi dan kunjungan ke tempat-tempat ibadah yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku di daerah	Belum Optimalnya Sosialisasi penataan perundang-undangan terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	Akan dilaksanakannya Sosialisasi perihal dengan kerukunan umat beragama	Kepala Seksi Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	TW1-TW IV
3	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	ROO.24.40.28.10	Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula Sebanyak 35 Orang dan Lanjutan sebanyak 35 orang	Lebih Memperluas Sasaran pendidikan politik bagi masyarakat pemilih pemula dan lanjutan	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala	Kepala Seksi Politik dalam Negeri dan Pengawasan Ormas	TW IV
4	Kekurangan SDM Internal Kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	ROO.24.99.28.16	Berkoordinasi dengan instansi vertikal	permohonan Kepada BKPSDM Penambahan Pegawai PNS/Non PNS	permohonan Kepada BKPSDM Penambahan Pegawai PNS/Non PNS	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	TW1-TW IV

Purwakarta, 3 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta



YOS DONAEDI RUSLI, S.STP, M.Si
NIP. 197904001998101001

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DI BANGUN

Nama Pemerintah Daerah
Nama OPD
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintah

: Pemerintah Kabupaten Purwakarta
: Badan kesatuan Bangsa dan Politik
: 2024
: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai
: Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media / Bentuk Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melaksanakan sosialisasi cara penyusunan dokumen perencanaan	Sosialisasi, Surat Edaran	Bakesbangpol	bakesbangpol, tim TAPD	Triwulan I	Triwulan IV	
2	Menyusun kebijakan perihal pendirian pembangunan tempat beribadah	melaksanakan tindak lanjut pembuatan perub	Bakesbangpol	Masyarakat,Tokoh Agama	Triwulan I	Triwulan II	
3	Menyusun surat edaran bagi penerima hibah untuk segera mempersiapkan kelengkapan persyaratan pengajuan hibah di awal tahun anggaran	Surat Edaran	Bakesbangpol	Bawaslu, Kpu, Kesbangpol, Parpol	Triwulan I	Triwulan IV	
4	Dilakukan mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh pihak muspika dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan 1. Mengedepankan unsur 3 pilar 2. Tertib administrasi kependudukan 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing	Sosialisasi dan pemantauan	Bakesbangpol	Masyarakat	Triwulan I	Triwulan IV	
5	Menyampaikan isu kaitan dengan diintegrasikan bangsa/suku yang akan memecah belah persatuan dan Kesatuan Bangsa	Sosialisasi	Bakesbangpol	Masyarakat,Tokoh Masyarakat	Triwulan I	Triwulan II	
6	Akan dilaksanakannya Sosialisasi perihal dengan kerukunan umat beragama	Sosialisasi	Bakesbangpol	Masyarakat,Tokoh Agama	Triwulan I	Triwulan III	

7	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala	Sosialisasi	Bakesbangpol	partai politik	Triwulan 1	Triwulan III	
8	permoonan Kepada BKPSDM Penambahan Pegawai PNS/Non PNS	Berkoordinasi dengan pihak BKPSDM	Bakesbangpol	bakesbangpol,BKPSDM	Triwulan 1	Triwulan IV	

Purwakarta, 3 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta



YUS DIONAEDI, RSN, S.STP, M.Si

NIP. 19730402 199810 1 001

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DI BUTUHKAN

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintah

: Pemerintah Kabupaten Purwakarta
: 2024
: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai
: Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media / Bentuk Sarana Pemantauan	Penganggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8
1	Melaksanakan sosialisasi cara penyusunan dokumen perencanaan	Sosialisasi	Kasubdag Tata Usaha	Triwulan I/IV	Triwulan	
2	Menyusun kebijakan perihal pendirian pembangunan tempat berteduh	melaksanakan tindak lanjut pembuatan perbub	Kepala Seksi Idiologi Wawasan kebangsaan dan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Triwulan I/IV	Triwulan II	Draf
3	Menyusun surat edaran bagi penerima hibah untuk segera mempersiapkan kelengkapan persyaratan pengajuan hibah di awal tahun anggaran	Surat Edaran	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Triwulan I	Triwulan III	
4	Dilakukan mediasi dan koordinasi dengan fasilitasi oleh pihak muspika dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Peningkatan sistim pengamanan diwlayah dengan 1. Mengedepankan unsur 3 pilar 2. Tertib administrasi kependudukan 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing	Sosialisasi dan pemantauan	Kepala Seksi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Triwulan I	Triwulan IV	
5	Menyampaikan isu kaitan dengan diintegrasikan bangsa/suku yang akan memecah belah persatuan dan Kesatuan Bangsa	Sosialisasi	Kepala Seksi Idiologi Wawasan kebangsaan dan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Triwulan I	Triwulan II	
6	Akan dilaksanakannya Sosialisasi perihal dengan kerukunan umat beragama	Sosialisasi	Kepala Seksi Idiologi Wawasan kebangsaan dan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Triwulan I	Triwulan III	

7	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala	Sosialisasi	Kepala Seksi Politik Dalam Negeri	Triwulan 1	Triwulan III	
8	permohonan Kepada BKPSDM Penambahan Pegawai PNS/Non PNS	Berkoordinasi dengan pihak BKPSDM	Kepala Seksi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Triwulan 1	Triwulan IV	

Purwakarta, 3 Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantorsetan Purwakarta

YUS DJUNADI RUSLI, S.STP, M.Si
NIP. 19790402199810 1 001